



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



SABTU PAHING

29 JUNI 2024 (21 BESAR 1957 / TAHUN LXXIX NO 257)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Muhammadiyah Turut Menjadi Korban Kasus PDN

YOGYA (KR) - Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia. Apalagi pemerintah sejauh ini belum memiliki *back up* data dari beberapa kementerian/lembaga yang tersandera dan masih berupaya untuk melakukan *recovery*.

“Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas permasalahan tersebut. Muhammadiyah yang memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan memiliki ribuan dosen dan guru besar datanya juga berada di PDN,” ungkap Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah Dr Ismail Fahmi dalam siaran persnya yang diterima KR, Jumat (28/6).

“Kami, tidak sekadar prihatin, namun juga sangat menyesali terjadinya kebocoran data ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Pusat Data Nasional mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6). Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan dan membuat data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas. Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN.

“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki *back up* data untuk itu, mengapa perencanaannya tidak memikirkan sistem *back up* dan manajemen risiko yang akan terjadi, jelas Ismail.

Oleh karena itu, Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta segera mengambil langkah-langkah pemulihan.

* Bersambung hal 7 kol 5



KR-Antara/Ahmad Subaidi

PARADE BUDAYA PEMBALAP MXGP: Sejumlah pembalap MXGP dan MX2 menaiki Jaran Kamput atau kuda tunggangan (kesenian khas suku Sasak Lombok) saat mengikuti Parade Budaya Pembalap MXGP di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/6/2024). Parade Budaya Pembalap tersebut digelar sebagai rangkaian praevent menuju balapan MXGP yang digelar di Sirkuit Selaparang dan sekaligus sebagai bentuk perkenalan para pembalap kepada masyarakat luas.

Dianggap Tak Mampu Tangani Peretasan

Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur

JAKARTA (KR) - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi melalui situs change.org yang mendesak Menteri Komunikasi

dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menyebutkan, petisi itu digulir-

kan untuk mengampanyekan kepada seluruh masyarakat, ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada se-

rangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Di sisi lain, Budi Arie Setiadi sendiri memilih untuk tidak berkomentar. “Kemunculan petisi

itu adalah hak rakyat untuk menyuarakan keinginannya,” ujarnya kepada pers, Jumat (28/6) usai dipanggil Presiden Joko Widodo.

Menurut keterangan sejak petisi tersebut dimunculkan, sudah tercatat ada tujuh ribu lebih yang memberikan dukungan.

* Bersambung hal 7 kol 1

Analisis Bencana PDN

Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS

APAKAH jebolnya data Pusat Data Nasional merupakan bencana besar? Jelas. Bagaimana tidak? Di PDN tersebut, terhubung berbagai data dan aplikasi, terutama yang berkaitan dengan kependudukan atau warga. Yang jelas sangat terganggu adalah layanan paspor. Bagaimana orang yang akan pulang ke tanah airnya sendiri tetapi datanya tidak dikenal. Belum lagi mahasiswa yang mendapat beasiswa di luar negeri, bisa tertunda pembayaran beasiswanya, padahal biaya hidup tentu tidak bisa ditunda. Yang beruntung mungkin adalah para buronan, karena bisa hilang jejaknya.

Sebetulnya, apakah bencana yang dialami PDN ini bisa dicegah? Sebelum menjawab itu, saya ingin mengatakan bahwa ada masalah lain yang juga sangat krusial, yang tidak kalah mengerikan dibanding terbaknya data oleh ransomware. Dalam pengembangan sistem informasi, apalagi di tingkat nasional (baik oleh Pemerintah maupun perusahaan partikelir), tahapannya adalah sebagai berikut: (1) susun dulu renstra teknologi informasinya, (2) susun arsitekturnya, (3) buat simulasinya, (4) bangun aplikasinya, (5) pasang pengamanannya, (6) diuji coba sampai matang,

* Bersambung hal 7 kol 1

DENDA RP 500 JUTA SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

JAKARTA (KR) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (28/6) menggelar sidang dengan agenda tuntutan pada terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut SYL pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsidier pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020-2023.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidier pidana kurungan se-



KR-Antara/M Risyah Hidayat

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementan Syahrul Yasin Limpo (kanan) menyalami Jaksa Penuntut Umum sebelum mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

lama enam bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap Jaksa Penuntut Umum KPK Meyer Simanjuntak.

Selain itu, SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan ditambah 30.000 dolar Amerika

Serikat, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap

* Bersambung hal 7 kol 5

NOVEL BASWEDAN DAN KAWAN-KAWAN Mantan Penyidik Ingin Daftar Capim KPK

JAKARTA (KR) - Sebagian anggota Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute yang merupakan mantan pegawai dan penyidik KPK berkeinginan mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2024-2029. Mereka merasa bisa memulihkan kembali kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Beberapa anggota IM 57 Institute berkeinginan mendaftar capim KPK berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni melihat kondisi KPK yang semakin mengkhawatirkan, beberapa pimpinan melakukan pelanggaran kode etik dan Ketua KPK menjadi tersangka,” ujar Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (28/6).

Menurut Praswad sedikitnya ada 12 orang yang ingin mendaftar sebagai capim KPK. Selain dirinya, mereka yang mau mendaftar yakni mantan penyidik OTT KPK Harun Al Rasyid, penyidik senior KPK Novel Baswedan, Budi Agung Nugroho dan Andre Dedy Nainggolan.

Selain itu, juga ada Herbert Nababan, Andi Abdul Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika dan Wally Ggantika. Mereka ingin bergabung kembali ke KPK untuk memulihkan kepercayaan publik yang merosot.

Namun, diakui Praswad, pendaftaran mereka terkendala persyaratan batas minimal usia bagi pimpinan KPK. Dengan demikian, pihaknya dan kawan-kawan sedang mengajukan uji materi aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

* Bersambung hal 7 kol 5

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:46	15:05	17:36	18:50	04:31
Sabtu, 29 Juni 2024	Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY				

PEMERINTAH PASTIKAN Tarif Listrik Juli - September Tidak Naik

JAKARTA (KR) - Pemerintah memastikan tarif listrik pada triwulan III, yakni Juli - September 2024 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri, serta menjaga tingkat inflasi.

“Kalau listrik, nggak naik,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Jakarta, Jumat (28/6).

Melalui keterangan resminya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,” katanya.

* Bersambung hal 7 kol 5

BANDUNG (KR) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mengusulkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyakKita naik menjadi Rp 15.700 perliter.

Mendag saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/6) mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kenaikan HET MinyakKita sebesar Rp 1.700 dari harga sebelumnya Rp 14.000 perliter. “Ya kita lagi nunggu Permendag, sementara saya minta Dirjen Kemendag untuk relaksasi harga Rp 15.700 perliter,” kata Mendag.

Menurut Mendag, kenaikan harga itu kemungkinan akan naik dalam waktu

KENAIKAN HET MINYAKITA Mendag Usulkan Jadi Rp 15.700/Liter



KR-Antara/Raisan Al Farisi

Dokumentasi warga melakukan transaksi di sebuah jongko di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Saat itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan HET MinyakKita naik dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.000 perliter.

yang tidak lama ini, setelah hasil Permendag yang diusulkan pihaknya selesai.

Zulhas menyampaikan

alasan relaksasi HET MinyakKita menjadi Rp 15.700 karena HET Rp 14.000 dinilai sudah tidak sesuai

lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan. “Harga MinyakKita ke Rp

15.700 penyesuaian saja, tidak naik,” katanya.

* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● KAMIS, 20 Juni 2024, seorang ibu mengantarkan anaknya di TK ABA Umbulharjo, Yogyakarta untuk ambil Rapor. Kepada gurunya, ia minta agar SPP berikutnya bisa potong buku tabungan. Sang anak pun langsung protes, tidak boleh. Alasannya, buku tabungan sudah bagus dan disampuli, “Gak boleh dipotong-potong!” (Winaryo Amanu, Janturan UH 4/446A RT 17 RW 04 Yogyakarta 55164).-d